



Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelayanan Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka)

Irsal Romadon¹, Nanan Sujana², Refly Badar³

^{1,2,3}Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Abstract

Received: 04 Desember 2023

Revised: 08 Januari 2024

Accepted: 01 februari 2024

Management of free health services in Tigaraksa District (a case study of the Healthy Indonesia Card at the Pasir Nangka Health Center). This study aims to find out how the management of the Healthy Indonesia Card at the Pasir Nangka Health Center is and to find out what are the inhibiting factors that become obstacles in the governance of the Healthy Indonesia Card service at the Pasir Nangka Health Center. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected by observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques include data collection, data editing, data presentation, and drawing conclusions. The theoretical concepts used in this study are indicators of good governance in Mahsun et al (2018: 48), namely Transparency, Accountability, Participation. Results of research and discussion that has been carried out. As well as based on research indicators which are a source of foundation in this study including Transparency, Accountability, Participation showing good results and factors in implementing the healthy Indonesia card are abuse and irregularities in recipients of the Healthy Indonesia Card program.

Keywords: Governance, Healthy Indonesia Card, Health Center.

(*) Corresponding Author: irsalromadon@gmail.com

How to Cite: Romadon, I., Sujana, N., & Badar, R. (2024). Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelayanan Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10643774>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya hal ini tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang N0.36 tahun 2009. Salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat yakni pemberian pelayanan kesehatan.

Pemberian Pelayan kesehatan dilakukan secara adil dan merata hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni menciptakan kesejahteraan yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, Termasuk dalam pembangunan dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Akses terhadap pelayanan kesehatan tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas tingkat sosial ekonominya. Penduduk yang tidak mampu atau miskin harus mempunyai kesempatan yang sama dengan penduduk yang mampu dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pelayanan kesehatan merupakan hak semua warga negara untuk menjamin kesehatan diperlukan suatu sistem yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan

bagi masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga negara untuk tetap hidup sehat. Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tumpuan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga negara untuk tetap hidup sehat. pelayanan kesehatan yang memadai merupakan merupakan tumpuan masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar selain pangan dan juga pendidikan. pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan peduli dan terpusat pada kebutuhan, harapan serta nilai-nilai pelanggan sebagai titik tolak penyediaan pelayanan kesehatan dan menjadi persyaratan yang harus dapat dipenuhi agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. masyarakat berhadapan untuk mendapatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, berkualitas serta merata dan non diskriminasi, sehingga hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut dapat terlindungi.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat menjamin hak masyarakat luas untuk hidup sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara merata, adil, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Pembangunan di bidang kesehatan melibatkan peran aktif masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.

Masyarakat semestinya berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk itu maka diperlukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat indonesia, yang pada hakikatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan (Rachmat, 2016: 20).

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan (Puskesmas) perlu adanya pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas oleh penyelenggara kesehatan, oleh sebab itu dituntut kinerja yang tinggi dari penyelenggara kesehatan itu sendiri.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat maka disetiap Kecamatan dibangun Instansi Pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya *promotif* dan *proventif*, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tepat guna dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik beratkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Tanpa mengabaikan kualitas kepada perorangan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan sarana pelayanan kesehatan, misalnya Puskesmas dan Rumah Sakit yang melibatkan Tenaga Medis (Dokter), tenaga Administrasi dan Perawat. Kinerja yang mereka tampilkan bisa menunjukkan apakah pelayanan ditempat tersebut berkualitas atau tidak. Salah satu program yang telah diluncurkan oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai

bagi rakyat miskin salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah baru Presiden Jokowi di mana program Kartu Indonesia Sehat memiliki payung hukum berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Dimana kebijakan Kartu Indonesia Sehat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki KTP. Kehadiran program ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat miskin dalam hal pembiayaan berobat dan perawatan yang dirasa begitu mahal.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 170/huk/2015 tentang penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan Jaminan kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5746).

Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Fasilitas Kesehatan. Berdasarkan surat edaran dirjen BUK Kemkes RI Nomor HK. 03.03/n.I/3555/2014 tanggal 5 November 2014.

Sehubungan dengan diluncurkannya Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tanggal 3 November 2014 dalam rangka menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dilaksanakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program KIS ini diprioritaskan untuk fakir miskin, orang tak mampu, dan peyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mereka akan didata terlebih dulu oleh Kementerian Sosial, kemudian didaftarkan ke BPJS untuk menerima KIS. Namun, apabila masyarakat umum ada yang ingin mendaftar secara *individu*, dapat secara langsung mendatangi kantor BPJS dan akan dikenakan iuran premi. Sedangkan untuk peserta yang melalui Kemensos, iuran ditanggung pemerintah.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah nama untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). KIS adalah program sementara BPJS kesehatan adalah badan yang ditugaskan untuk menjalankan program tersebut. KIS hanya kartunya dan tidak akan menggantikan JKN yang memegang KIS akan mendapatkan sejumlah benefit, salah satu edukasi.



Gambar 1. 1 kartu indonesia sehat

Sumber : kompas.com

KIS menjadi penanda peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kartu ini memuat identitas peserta jaminan kesehatan unik dan bernomor tunggal yang diperuntukan kepada semua penduduk Indonesia sebagai alat untuk mendapatkan program jaminan kesehatan dan pelayanannya. KIS dikeluarkan oleh pemerintah melalui BPJS kesehatan sebagai lembaga pengelola yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi semua warga.

Kebijakan pemerintah mengenai Kartu Indonesia Sehat merupakan langkah yang ditempuh oleh pemerintah saat ini untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban mereka dalam pembayaran kesehatan. Perihal kebijakan Kartu Indonesia Sehat tentu memiliki hambatan dalam mengimplementasikannya. Seperti terdapat sejumlah studi *empiris* mengenai dampak kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah mengalami berbagai hambatan atau gangguan terhadap kegiatan program yang sedang berjalan.

Hambatan dan tantangan tentu saja ada sebagai bagian dari lingkungan *eskternal* yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. hal ini juga diungkapkan dari tulisan seorang guru besar Administrasi Publik oleh Akib (2011) yang menyatakan bahwa “hambatan dan tantangan yang lebih berat justru yang berasal dari dalam organisasi pelaksana, seperti sikap apatis dan *inkonsistensi* aktor dalam bertindak diluar kesepakatan bersama”.

Wilayah kerja Puskesmas Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa meliputi Desa Pasir Nangka, Desa Pasir bolang, Desa Pete, Desa Pematang, Desa Tegalsari, Desa Matagara, dan Desa Cisereh dengan luas wilayah kerja 48,74 km². Data penerima program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka yaitu 26.868 peserta. Setiap bulan masyarakat berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat yaitu 800 hingga 900 peserta.

Program Kartu Indonesia Sehat masih ada permasalahan yang harus dibenahi, salah satunya dalam hal penentuan anggota peserta Kartu Indonesia Sehat, karena saat ini banyak peserta Kartu Indonesia Sehat yang tidak tepat sasaran, dimana masih banyak orang yang seharusnya berhak mendapatkan justru tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat.

Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah pemalsuan data atau identitas penerima Kartu Indonesia Sehat. Beberapa pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tersebut mencoba memanipulasi informasi dan mengajukan

permohonan secara tidak jujur, dengan tujuan untuk mengakses manfaat kesehatan tanpa seharusnya.

Permasalahan lain adalah penggunaan Kartu Indonesia Sehat oleh pihak yang bukan penerima yang sah. Hal ini menyebabkan alokasi dana kesehatan yang semestinya diperuntukkan bagi penerima Kartu Indonesia Sehat yang sah, justru digunakan oleh orang lain yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelayanan Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka).**

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Didalam melakukan penelitian sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahnya. Menurut (Sugiyono,2018) objek penelitian adalah sebagai berikut ”suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Objek penelitian ini mengenai pelayanan kesehatan gratis Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka.

Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *konstruktivisme*. secara *ontologis*, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, yang bersifat arad dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. karena itu,realitas yang diamati seorang tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang yang seperti biasa dilakukan dikalangan *positivis* atau *postpositivis*, atas dasar filosofi ini, maka satu kesatuan *subjektif*, dan merupakan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya, paradigm *konstruktivis* memandang ilmu sosial sebagai analisis terhadap *sosially meaning action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial dalam *setting* kehidupan sehari-hari yang wajar atau mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Anindya,2013).

Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat *induktif*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Setelah data diperoleh, kemudian disajikan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan katakarakteristik variable-variabel yang menjadi fokus penelitian yaitu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Tata kelola pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (studi kasus Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka).

Tipe Penelitian

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif. Menurut Best dalam buku Sukardi, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa dayanya. Setelah data diperoleh, kemudian disajikan menggunakan fokus analisis diskriptif kualitatif, yaitu fokus analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik fokus ke-variabel yang menjadi fokus peneliti yaitu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan kesehatan gratis Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena data dari informasi yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau keterangan keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka angka atau analisis statistik.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi 2 yaitu, data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar,2003:56).

Tabel 2.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	Dr. Herlin Hidayanti	Kepala Puskesmas	Puskesmas Pasir Nangka	1.1
2	Titin S., SIT	Kepala Tata Usaha	Puskesmas Pasir Nangka	1.2
3	Sahira	Masyarakat	Pematang	1.3
4	Munhayati	Masyarakat	Matagara	1.4
5	Dadi	Masyarakat	Pete	1.5
6	Mulyadi	Masyarakat	Cisereh	1.6

Sumber: Peneliti2023

Data sekunder

Data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2001:147) merupakan “sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) ” data sekunder yaitu data yang diteliti langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku. diperoleh berdasarkan catatan catatan penelitian terdahulu, maupun yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono,2005:62).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memecahkan suatu permasalahan secara tuntas dan baik diperlukan sejumlah data yang valid. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu digunakan

teknik pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini digunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data. untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

Sesuai pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai *alatre-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

(Abdullah, n.d.)

Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. (Lexy J Moleong) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan.

Disamping itu untuk memperlancar proses. Wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/ *interview* tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).

Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik informasi tentang pelayanan kesehatan gratis.

Tabel 2.2 Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan
<p>1. Transparansi (<i>Transparency</i>)</p>	<p>1. Apakah Informasi diberitahukan secara tepat waktu jika terdapat informasi terkait Kartu Indonesia Sehat</p> <p>2. Bagaimana proses transparansi informasi di Puskesmas Pasir Nangka</p>
<p>2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)</p>	<p>1. Bagaimana peran pegawai Puskesmas Pasir Nangka dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Kartu Indonesia Sehat</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Kartu Indonesia Sehat apakah sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang melandasinya</p>

3.Partisipasi <i>(participation)</i>	1. Bagaimana awal mula pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka 2. Apakah semua masyarakat Pasir Nangka mengerti penggunaan Kartu Indonesia Sehat
--	---

Sumber : Peneliti 2023

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih *kredibel* dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber (Nana Syaodih,2013:221).

Tringulasi Data

Dalam teknik pengumpulan data, terdapat istilah triangulasi data. Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada sehingga apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan tringulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek *kredibilitas* data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik Analisis Data

Analisis data dimana data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian (Arikunto, 2010)

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif yang diartikan sebagai suatu cara peneliti untuk mengolah dan memaparkan data sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang dianalisis tentang Tata kelola pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (studi kasus Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka).

Langkah-langkah menganalisis data, menurut Arikunto (2014:57)

Pencatatan data

Pencatatan dilakukan dalam format catatan lapangan yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Pencatatan awal dilakukan selama wawancara, observasi, studi dokumentasi dengan menggunakan kata kunci.
- 2) Peluasan yang merupakan bentuk catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan *reflektif* yang merupakan tanggapan peneliti.
- 3) Melakukan perbaikan (revisi)

Data yang diperoleh dilapangan saat melakukan observasi dan wawancara tentang Tata kelola pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (studi kasus Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka).

Langsung dicatat dengan kata-kata hingga seluruh data yang diteliti dirasa cukup oleh peneliti.

Reduksi data

Data yang didapat dilapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi. Terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan lembar. Oleh sebab itu, laporan harus dianalisis sejak dimulainya penelitian.laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. kemudian mencari temannya, data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu waktu diperlukan. Reduksi data pula membantu dalam memberikan kode kode pada aspek tertentu.

Data yang telah dicatat oleh peneliti dipilah-pilih sehingga menjadi lebih rinci dan jelas mengenai fokus penelitian dengan memaparkan tentang Tata kelola pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (studi kasus Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka).

Data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan *display* data. *Display* data ialah menyajikan data dalam bentuk *table*, *matriks*, *network*, *chart*, atau *grafik*, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai dan data tidak terbenam dengan setumpuk data.

Verifikasi data

Verifikasi data dimana peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya, untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya itu ia mencoba mengambil kesimpulan, mula mula kesimpulan itu kabur, tetapi seiring berjalannya waktu semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung.

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru atau mencari kebenaran atau kevalidan hasil data yang diperoleh dengan kembali lagi atau turun ke lapangan dengan melakukan verifikasi terhadap orang terkait dan juga masyarakat mengenai fokus penelitian yang telah ditemukan tentang Tata kelola pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (studi kasus Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka).

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Pasir Nangka yang beralamat di Jl. Aria Jaya Santika Ds, Pasir Nangka Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720. Jadwal penelitian mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.

Tabel 2.3 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian								
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan Judul	■								
2.	Observasi Awal		■							
3.	Penyusunan Proposal		■	■	■					
4.	Bimbingan Proposal		■	■	■					
5.	Seminar Proposal				■					
6.	Revisi Hasil Seminar					■	■	■	■	
7.	Pengolahan Data					■	■	■	■	■
8.	Sidang Skripsi									■
9.	Revisi Hasil Sidang									■

Wilayah Administratif

Secara Administratif wilayah kerja Puskesmas Pasir Nangka memiliki 7 wilayah Desa yang terdiri :

1. Desa Pasir Nangka
2. Desa Pasir Bolang
3. Desa Pete
4. Desa Pematang
5. Desa Tegalsari
6. Desa Matagara
7. Desa Cisereh

Seluruh wilayah kerja Puskesmas Pasir Nangka dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Jarak tempuh dari desa ke Puskesmas rata-rata 15 menit, kecuali Desa Pasir Bolang dengan jarak tempuh dari Puskesmas ke Desa kurang lebih 30 menit kondisi jalan di 7 Desa di Puskesmas Pasir Nangka sudah mendukung untuk transportasi penduduk sehingga mendukung pula mempermudah akses masyarakat untuk berkunjung ke Puskesmas Pasir Nangka.

Tabel 3.1 Jumlah RW dan RT Per Desa UPTD Puskesmas Pasir Nangka Tahun 2022

NO	Nama Desa	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas wilayah
1	Pasir Nangka	12	88	3,92 Km ²
2	Pasir Bolang	3	14	3,19 Km ²
3	Pematang	6	32	3,65 Km ²
4	Pete	6	41	2,48 Km ²
5	Tegal Sari	5	15	3,03 Km ²
6	Matagara	10	40	3,18 Km ²
7	Cisereh	4	15	4,07 Km ²
Jumlah		46	245	23,51 Km ²

Sumber data: Kantor Kecamatan Tigaraksa 2023

Kadaan Penduduk

Jumlah dan Distribusi Penduduk

Berdasarkan data yang di peroleh BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk Kelurahan Pasir Nangka pada tahun 2022 sebesar 80.113 jiwa. Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, jumlah penduduk perempuan relative lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu masing-masing sebesar 40,966 jiwa untuk penduduk perempuan dan 39.147 jiwa penduduk laki-laki.

Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	0-4	3.630	3.653	7.283
2	5-9	3.923	3.721	7.644
3	10-14	3.907	3.609	7.156
4	15-19	3.673	3.426	8.099
5	20-25	3.490	3.465	6.955

6	25-29	3.416	3.377	6.793
7	30-34	3.302	3.337	6.639
8	35-39	3.396	3.437	6.833
9	40-44	3.516	3.670	7.186
10	45-49	3.380	3.091	6.833
11	50-54	2.445	1.758	4.201
12	55-59	1.231	949	2.180
13	60-64	749	707	1.456
14	65-69	470	473	943
15	70-74	250	250	500
16	75+	188	226	414
JUMLAH		40.966	39.147	80.113

Sumber: Balai Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2023

Profil Penduduk Wilayah Puskesmas Pasir Nangka

Jumlah Penduduk di Wilayah Puskesmas Pasir Nangka tahun 2022, menurut data dari BPS Kecamatan Tigaraksa sebanyak 80.113 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi di Desa Pasir Nangka yang berjumlah 25.510 jiwa, sedangkan yang terendah di Desa Tegalsari yaitu 4.913 jiwa.

Dari data BPS Kecamatan Tigaraksa, Pasir Nangka menunjukkan menunjukkan struktur penduduk usia produktif yaitu usia 15 s/d 64 tahun adalah 69,66% dari keseluruhan jumlah penduduk yaitu 55.813 jiwa, berumur 0 s/d 14 tahun adalah 27,56% yaitu 22.083 jiwa dan 2,31% adalah penduduk berumur > 65 tahun atau 1.857 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk berjenis kelamin laki-laki persentasenya 51,13% (40.966 jiwa) dan perempuan 48,86% (939.147 jiwa).

Visi dan Misi Puskesmas Pasir Nangka

Visi

“ Menjadikan Puskesmas sebagai pusat Pelayanan Kesehatan unggulan yang berkualitas, professional dan terjangkau”

Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang professional
3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
4. Memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan dengan menjalin kerjasama lintas sektoral.

Motto

SMILE KAMI UNTUK SEHATMU (SMILE: Senyum, Melayani, Ikhlas, Loyalitas, Empati).

Tata Nilai

1. Kejujuran dalam bertindak

Penjelasan : berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, kerja keras, berkomitmen, mendahulukan kepentingan organisasi, serta manpu menjaga keseimbangan *Emotional Quotion* (EQ), *Intelektual Quotion* (IQ), dan *Spiritual Quotion* (SQ).

2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas

Penjelasan: dalam melaksanakan pekerjaan harus dapat Dipertanggung jawabkan dengan berlandaskan pada kaidah ilmiah dan kaidah profesi serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3. Kerjasama

Penjelasan: Semua petugas sensntiasa berupaya untuk memberikan pelayanan prima dan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan, baik lintas program maupun lintas sektoral.

4. Santun dalam Pelayanan

Penjelasan : dalam berkata dan berperilaku menyesuaikan norma yang berlaku di masyarakat beretika penuh empati dan berpikir positif.

Struktural Organisasi Puskesmas Pasir Nangka

Struktur Organisasi Puskesmas Pasir Nangka Terdiri atas :

1. Kepala Puskesmas : Dr.Herlin Hidayanti
2. Kepala Tata Usaha: Titin S., SIT
3. PJ Ukm Esensial dan Perkesmas: Yani Oktaviani, SST
 - a. Koord. Promkes : Dinan Meutia
 - b. Koord. Uks : Diana Eka Juniarti
 - c. Koord. Kia-Kb-Ukm : Yani Oktaviani
 - d. Koord. Gizi Ukm : Farida Andriantika
 - e. Koord. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (P2P) : Linda Silitonga
 - f. Koord. Perkesmas : Ebah
4. PJ . Ukm Pengembangan
 - a. Koord. Kes.Jiwa : dr. Fauziah Amarylis
 - b. Koord. Kes.Gigi Masyarakat: drg. Nadya Dara
 - c. Koord. Tradisional Komplementer: Erna Sulastris
 - d. Koord. Indera : Rosendang S
 - e. Koord. Lansia : Bahriyah
 - f. Koord. Kes Kerja : Ni Made Widya A
5. PJ. Ukp,Kefarmasian dan Laboratorium : dr.Fauzia Amaryllis
 - a. Koord. Pemeriksaan Umum : dr. Andri Sitepu
 - b. Kooord. Kesehatan Gigi Dan Mulut : drg. Sandra Devi
 - c. Koord. Gawat Darurat : Silmi Firdawati
 - d. Koord. Gizi Ukp : Farida Andriantika
 - e. Koord. Persalinan : Rani Hastuti
 - f. Koord. Kefarmasian : Dwi Cahya Untari
 - g. Koord. Laboratorium : Siti Hardiyanti R
6. PJ. Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Yani Oktaviani
 - a. Koord. Pusling : Yafismar
 - b. Koord. Bidan Desa: Yani Oktaviani
 - c. Koord Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta : Erna sulastris
7. PJ. Bangunan, Prasarana, dan Peralatan : Cuci Darningsih
8. PJ. Mutu : dr. Andri Sitepu
 - a. Koord. Audit Internal : drg. Sandra Devi
 - b. Koord. Manajemen Komplain : Dinan Meutia
 - c. Koord. Survei Kepuasan Pelanggan : Erna Sulastris SKM

d. Koord. Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien : drg. Yayah Fadliyah

Tabel 3.3 Distribusi ketenagaan Puskesmas Pasir Nangka Tahun 2022

NO	Katagori Tenaga	Status			Jumlah
		NS	PTT/PKK	Lain-Lain	
1	Kepala Puskesmas		-	-	1
2	Ka Sub. Bag TU		-	-	1
3	Dokter Umum		2	0	4
4	Dokter Gigi		1	-	3
5	Bidan	13	4	6	23
6	Perawat		-	1	5
7	Perawat Gigi		-	-	1
8	Nutrision		-	1	2
9	Penyuluh Kesehatan		-	-	1
10	Kesehatan Lingkungan		-	-	1
11	Analisis		-	1	2
12	Administrasi		-	7	7
13	Tenaga Kebersihan		-	3	3
14	Tenaga Pengamanan		-	5	5
15	Tenaga Pengemudi		-	3	3
16	Epidemiologi		-	-	1
17	Rekam Medis		-	-	1
Jumlah		31	7	28	67

Hasil Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan hasil wawancara sehingga peneliti mendapatkan data yang valid serta gambaran yang akan menjawab permasalahan hingga ditarik menjadi kesimpulan lalu disertakan dokumentasi, selanjutnya pada bab ini menganalisa dari berbagai sisi dengan tujuan peneliti yaitu untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana Tata kelola pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (studi kasus Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka).

Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pasir Nangka

Tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan sebuah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tidak terlepas dari permasalahan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan pemerintah yang berkualitas. Sangat penting untuk menerapkan *good governance* di tingkat organisasi terkecil seperti kelurahan untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau subsidi dari pemerintah pusat. *Good governance* dapat menciptakan pemerintah yang berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan pemerintah dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Terdapat informan yang terpilih yang mewakili ada 6 responden merupakan sampling perwakilan Kepala Puskesmas Pasir Nangka, Kepala Tata Usaha. Dan masyarakat perwakilan yang merupakan penerima Kartu Indonesia Sehat sebanyak 4 orang.

Tabel 4.4 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	Dr. Herlin Hidayanti	Kepala Puskesmas	Puskesmas Pasir Nangka	1.1
2	Titin S., SIT	Kepala Tata Usaha	Puskesmas Pasir Nangka	1.2
3	Sahira	Masyarakat	Pematang	1.3
4	Munhayati	Masyarakat	Matagara	1.4
5	Dadi	Masyarakat	Pete	1.5
6	Mulyadi	Masyarakat	Cisereh	1.6

Sumber:Peneliti 2023

Untuk mengetahui bagaimana Tata kelola pelayanan kesehatan gratis di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang (studi kasus Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka) menggunakan teori Mahsun dkk (2018:48) adapun dengan indikator yang meliputi dari *good governance* yaitu :*Tranparansi (transparency)* Akuntabilitas (*accountability*), Partisipasi (*participation*) .

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan. Dalam instansi pemerintahan, transparansi menjadi hal yang rawan dan penting. Karena sumber utama dana pemerintah adalah dari rakyat yang tentunya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi menunjukkan pengelolaan keuangan yang terbuka atau tidak ada yang tersembunyi. Adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat pemerintah membuat penerapan program Kartu Indonesia Sehat yang dianggap transparan. Pemerintah membuat papan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan sebagai bentuk transparansi dalam penerapan sebuah program. Selain itu, akses informasi yang transparan juga didapatkan oleh masyarakat.

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelayanan mengenai informasi Kartu Indonesia Sehat yaitu transparansi karena keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pihak yang membutuhkan informasi, sama seperti yang di utarakan informan 1 Sebagai berikut :

“Informasi mengenai Kartu Indonesia Sehat di informasikan oleh pihak BPJS Kesehatan kepada pihak Puskesmas Pasir Nangka dengan cara diberikan surat pemberitahuan maupun secara digital seperti whatsapp maupun email” (Sabtu , 24 Juni 2023)

Dengan transparansi informasi yang ditingkatkan ini, diharapkan masyarakat di sekitar Puskesmas Pasir Nangka dapat lebih mudah memahami dan memanfaatkan program Kartu Indonesia Sehat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih

baik dan lebih terjangkau. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat setempat secara keseluruhan. Hal ini ditambahkan dan disampaikan oleh informan yaitu informan 2 Sebagai berikut:

”Penyuluhan informasi kesehatan diberikan oleh pihak puskesmas melalui posyandu di desa desa yang merupakan lingkup dari Puskesmas Pasir Nangka yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dan kader kader Puskesmas kepada masyarakat” (Rabu, 5 Juli 2023)

Dalam upaya meningkatkan transparansi, Puskesmas Pasir Nangka telah menyediakan papan informasi yang terpasang di area publik puskesmas. Papan informasi ini memuat brosur yang berisi rincian lengkap mengenai Kartu Indonesia Sehat, serta nomor kontak dan alamat puskesmas untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atau bertanya-tanya terkait program tersebut.hal ini dikonfirmasi oleh informan 3 Sebagai berikut:

”Pihak Puskesmas Pasir Nangka sudah memberikan informasi mengenai Kartu Indonesia Sehat dengan cara yang baik” (Sabtu ,8 Juli 2023)

Program Kartu Indonesia Sehat dijalankan dengan sangat transparan. Setiap masyarakat yang berhak mendapatkan kartu ini diberikan informasi secara jelas mengenai persyaratan dan prosedur untuk mendapatkannya. Petugas puskesmas dengan ramah dan penuh kesabaran memberikan panduan dan bantuan kepada warga yang ingin mengajukan permohonan kartu tersebut. Hal ini disampaikan oleh Informan 4 sebagai berikut :

“Informasi mengenai program Kartu Indonesia Sehat diberitahukan oleh kader Puskesmas dan dibantu oleh Puskesmas Pasir Nangka kepada masyarakat” (Sabtu, 8 Juli 2023)

Pelayanan di Puskesmas Pasir Nangka juga didesain untuk lebih transparan dan mudah diakses oleh pemegang Kartu Indonesia Sehat. Setiap proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan diatur dengan baik, dan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas langkah-langkah yang perlu diikuti dalam setiap tahapnya.

Tenaga medis dan petugas di Puskesmas juga telah dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada setiap pasien, termasuk pemegang Kartu Indonesia Sehat. Hal ini di sampaikan oleh informan 5 sebagai berikut :

“Saya mendapatkan informasi dari pihak desa mengenai Kartu Indonesia Sehat dan langsung diberikan informasi tambahan dan kemudian dijelaskan dengan baik oleh pihak puskesmas” (Sabtu, 8 Juli 2023)

Puskesmas Pasir Nangka menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan yang aktif dalam program ini tenaga medis dan petugas di Puskesmas juga telah dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada setiap pasien, termasuk pemegang Kartu Indonesia Sehat. hal ini disampaikan oleh informan 6 sebagai berikut:

“Saya sudah mengerti cara menggunakan Kartu Indonesia Sehat karna diberitahu oleh pihak Puskesmas” (Sabtu, 8 Juli 2023)

Bisa disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menurut indikator Transparansi pada pelayanan dan pengelolaan informasi sudah dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari beberapa pihak terkait dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan juga baik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga transparansi yang di lakukan oleh pihak Puskesmas mampu di terima oleh masyarakat Pasir Nangka.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban hukum atau moral dari individu, perusahaan ataupun kelompok untuk memberikan kejelasan dalam menggunakan peralatan, uang, atau kewenangan yang diserahkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemilik kepentingan dan penerima manfaat. Akuntabilitas menjadi suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di publik atau yang dimiliki beberapa *stakeholder*.

Akuntabilitas adalah laporan hasil kerja seseorang atau organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, laporan kinerja juga dapat di ukur dengan standar yang telah di tetapkan selama periode tertentu. Akuntabilitas pada penelitian ini disampaikan oleh informan pertama yaitu informan 1, Sebagai berikut :

“Pihak Puskesmas Pasir Nangka sudah melakukan pengelolaan dan pelayanan Kartu Indonesia Sehat sudah sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan” (Sabtu, 24 Juni 2023)

Pemerintah yang akuntabel adalah memiliki pengukuran, tujuan dan sasaran program yang diusulkan dan dijalankan. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi penekanan pemerintah sebagai agenda utama reformasi birokrasi adalah penguatan aspek akuntabilitas. Dengan akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. hal ini disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut:

”Pihak Puskesmas Pasir Nangka telah melakukan pelayanan yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada karena tidak ingin terkena teguran oleh Dinas Kesehatan” (Rabu, 5 Juli 2023)

Puskesmas juga memastikan bahwa setiap pemegang kartu mendapatkan informasi yang jelas tentang layanan kesehatan yang mereka terima. Hal ini disampaikan oleh Informan 3 sebagai berikut :

“Program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu yang ingin berobat di puskesmas dengan cara gratis dan menggunakan Kartu Indonesia Sehat” (Sabtu,8 Juli 2023)

Informasi terkait pendaftaran, hak dan kewajiban pemegang kartu, serta jenis layanan yang dapat diakses melalui program kartu Indonesia Sehat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Hal ini di konfirmasi oleh informan 4 sebagai berikut :

“Saya sudah sering berobat di Puskesmas Pasir Nangka dan sudah dilayani dengan baik dan mendapatkan informasi secara jelas” (Sabtu,8 Juli 2023)

Program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.hal ini di sampaikan oleh informan 5 sebagai berikut :

“Saya merasa sangat terbantu untuk berobat ketika sedang sakit dan dilayani dengan baik” (Sabtu, 8 Juli 2023)

Kartu Indonesia Sehat merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh informan 6 sebagai berikut:

“Program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk berobat secara gratis” (Sabtu, 8 Juli 2023)

Bisa disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menurut indikator akuntabilitas telah berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur yang telah di tentukan , dan dapat diartikan bahwa Puskesmas telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan dan menghasilkan hasil yang sudah ditentukan.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah media untuk perolehan informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang penting terlibat dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat akan lebih memberikan kepercayaan yang tinggi ketika terlibat dalam pembangunan yang mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat juga merupakan hak masyarakat karena mereka yang akan merasakan manfaat dari pengelolaan keuangan dan juga keterlibatan seorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi pada penelitian ini disampaikan oleh informan 1 Sebagai berikut :

“Pihak Puskesmas melakukan pendataan bagi orang yang tidak mampu dengan mengumpulkan setiap bidan desa untuk melakukan sosialisasi dan pendataan diberikan kepada dinas kesehatan kemudian di laporkan kepada pihak BPJS kesehatan dan kemudian data diberikan kepada pihak Puskesmas agar mengetahui jumlah anggota Kartu Indonesia Sehat” (Sabtu, 24 Juni 2023)

Masyarakat yang berpartisipasi lebih aktif dalam menyampaikan pendapat cenderung tidak apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan. Partisipasi masyarakat adalah sumbangsih sukarela dari masyarakat, baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga dalam pelaksanaan program kerja yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari terwujudnya *good governance* adalah hal yang penting.

Ketika hubungan masyarakat dengan pemerintah setempat baik maka partisipasi masyarakat juga akan baik. hal ini disampaikan oleh informan 2 Sebagai berikut:

“Kendala mengenai pelayanan terjadi di awal program kartu indonesia sehat dikarenakan masyarakat yang kurang mengerti perihal Kartu Indonesia Sehat dan mengenai pelayanan di Puskesmas yang hanya menjadi pelayanan dasar atau pelayanan pertama dan pihak Puskesmas melakukan sosialisasi dan akhirnya masyarakat sudah paham mengenai pelayanan di Puskesmas”(Rabu, 5 Juli 2023)

Setiap pemerintah diharuskan menegakkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah guna melaporkan serta menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan dapat dijadikan lahan untuk pelaksanaan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Hal ini di sampaikan oleh informan 3 sebagai berikut :

“Saya sudah mengerti mengenai cara penggunaan dan pelayanan Kartu Indonesia Sehat karena dijelaskan oleh pihak Puskesmas” (Sabtu,8 Juli 2023)

Informasi terkait pendaftaran, hak dan kewajiban pemegang kartu, serta jenis layanan yang dapat diakses melalui program kartu Indonesia Sehat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Informan 4 sebagai berikut :

“Pihak puskesmas sudah melakukan sosialisasi sehingga masyarakat sudah mengerti mengenai Kartu Indonesia Sehat” (Sabtu, 8 Juli 2023)

Partisipasi Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka sangatlah signifikan. Dengan adanya kartu ini, masyarakat di wilayah tersebut dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar secara lebih mudah dan terjangkau. Kartu Indonesia Sehat memberikan manfaat berupa layanan kesehatan gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau di Puskesmas. Hal ini disampaikan oleh informan 5 sebagai berikut :

“Saya di data oleh pihak Desa dibantu dan di jelaskan mengenai program Kartu Indonesia Sehat sehingga mengerti cara penggunaan Kartu Indonesia Sehat” (Sabtu, 8 Juli 2023)

Kartu Indonesia Sehat juga membantu mengurangi beban ekonomi bagi keluarga yang sebelumnya mungkin kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan karena biaya yang tinggi. Dengan demikian, partisipasi Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan hal ini di sampaikan oleh informan 6 sebagai berikut :

“Saya merasa terbantu oleh program ini dan pihak puskesmas menjelaskan mengenai informasi dan pelayanan dengan sangat jelas” (Sabtu, 8 Juli 2023)

Partisipasi masyarakat di wilayah Pasir Nangka dapat dikatakan telah terlaksana secara maksimal. Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan menunjukkan adanya hubungan baik antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Keterlibatan dalam pendataan hingga proses pelaksanaannya menjadi bukti bahwa masyarakat telah berpartisipasi secara maksimal. Keterlibatan aktif masyarakat pada pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat merupakan hal yang harus menjadi perhatian penting.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menurut indikator partisipasi menyatakan bahwa pihak Puskesmas telah melakukan pendataan dan memberikan informasi mengenai pelayanan Kartu Indonesia Sehat dengan cukup baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengerti cara menggunakan Kartu Indonesia Sehat dan juga memahami tentang pelayanan dan informasi di Puskesmas Pasir Nangka, partisipasi masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Nangka juga sudah dikatakan terlaksana secara maksimal.

Pembahasan

Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pasir Nangka

Tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan sebuah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tidak terlepas dari permasalahan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan pemerintah yang berkualitas. Sangat penting untuk menerapkan *good governance* di tingkat organisasi terkecil seperti kelurahan untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau subsidi dari pemerintah pusat. *Good governance* dapat menciptakan pemerintah yang berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan pemerintah dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik..

Untuk mengetahui tata kelola penerapan program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pasir Nangka ini menggunakan teori *Good Governance* dalam (Mahsun:2018:48) yaitu : Transparansi (*Transparency*), (*Accountability*), dan Partisipasi (*Participation*). Dari ketiga indikator tersebut kemudian dianalisis dengan hasil dibawah ini :

Pertama, Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian dengan indikator transparansi dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dilihat dari beberapa pihak terkait dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan juga baik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga transparansi yang di lakukan oleh pihak Puskesmas mampu di terima oleh masyarakat Pasir Nangka.

Indikator yang kedua merujuk pada indikator akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan kewajiban hukum atau moral dari individu, perusahaan ataupun kelompok untuk memberikan kejelasan dalam menggunakan peralatan, uang, atau kewenangan yang diserahkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemilik kepentingan dan penerima manfaat. Akuntabilitas menjadi suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di publik atau yang dimiliki beberapa *stakeholder*.

Akuntabilitas adalah laporan hasil kerja seseorang atau organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, laporan kinerja juga dapat di ukur dengan standar yang telah di tetapkan selama periode tertentu. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menurut indikator akuntabilitas dapat diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan atau memegang tanggung jawab mereka terhadap pencapaian dan hasil yang sudah ditentukan.

Ketiga, indikator partisipasi Partisipasi masyarakat adalah media untuk perolehan informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang penting terlibat dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat akan lebih memberikan kepercayaan yang tinggi ketika terlibat dalam pembangunan yang mulai dari perencanaan hingga evaluasinya Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan menunjukkan adanya hubungan baik antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan menurut indikator partisipasi menyatakan bahwa pihak puskesmas telah melakukan pendataan dan memberikan informasi mengenai pelayanan Kartu Indonesia Sehat dengan cukup baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengerti cara menggunakan Kartu Indonesia Sehat dan juga memahami tentang pelayanan dan informasi di Puskesmas Pasir Nangka, partisipasi masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Nangka juga sudah dikatakan terlaksa secara maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Pasir Nangka dalam penerapan program Kartu Indonesia Sehat sudah sesuai dengan indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Transparansi pada pelayanan dan pengelolaan informasi sudah dikatakan

berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari beberapa pihak terkait dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan juga baik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga transparansi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas mampu diterima oleh masyarakat Pasir Nangka. Kemudian menurut indikator akuntabilitas telah berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, dan dapat diartikan bahwa Puskesmas telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan dan menghasilkan hasil yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir menurut indikator partisipasi menyatakan bahwa pihak puskesmas telah melakukan pendataan dan memberikan informasi mengenai pelayanan Kartu Indonesia Sehat dengan cukup baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengerti cara menggunakan Kartu Indonesia Sehat dan juga memahami tentang pelayanan dan informasi di Puskesmas Pasir Nangka, partisipasi masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Nangka juga sudah dikatakan terlaksana secara maksimal.

Faktor Penghambat Kartu Indonesia Sehat

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah mempunyai peranan yang begitu penting untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada semua masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila dalam praktik penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan baik pula, serta pemerintah harus terbuka atau transparan dan juga bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaiknya demi terwujudnya praktik pelayanan yang transparan, akuntabel dan partisipan. Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya tidak lepas dari faktor penghambat yang memengaruhi proses pelayanan Kartu Indonesia Sehat. Dalam pelayanan Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat harus dilakukan secara transparansi kepada masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat

Program Kartu Indonesia Sehat dirancang dengan tujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Namun, seperti banyak program sosial lainnya, penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap Kartu Indonesia Sehat juga terjadi.

Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah pemalsuan data atau identitas penerima Kartu Indonesia Sehat. Beberapa pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tersebut mencoba memanipulasi informasi dan mengajukan permohonan secara tidak jujur, dengan tujuan untuk mengakses manfaat kesehatan tanpa seharusnya.

Permasalahan lain adalah penggunaan Kartu Indonesia Sehat oleh pihak yang bukan penerima yang sah. Hal ini menyebabkan alokasi dana kesehatan yang semestinya diperuntukkan bagi penerima Kartu Indonesia Sehat yang sah, justru digunakan oleh orang lain yang tidak memenuhi syarat.

Penyalahgunaan dan penyimpangan pada program Kartu Indonesia Sehat menjadi ancaman serius bagi tujuan awal program untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Peningkatan pengawasan, prosedur verifikasi yang ketat, dan transparansi dalam pengelolaan dana adalah beberapa upaya yang dapat membantu mengurangi risiko penyimpangan dalam program ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pada pelaksanaan Tata Kelola Penerapan Program Kartu Indonesia Sehat. Transparansi pada pelayanan dan pengelolaan informasi sudah dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari beberapa pihak terkait dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan juga baik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga transparansi yang di lakukan oleh pihak Puskesmas mampu di terima oleh masyarakat Pasir Nangka
2. Indikator akuntabilitas telah berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur yang telah di tentukan ,dan dapat diartikan bahwa Puskesmas telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan dan menghasilkan hasil yang sudah ditentukan.
3. Indikator partisipasi menyatakan bahwa pihak puskesmas telah melakukan pendataan dan memberikan informasi mengenai pelayanan Kartu Indonesia Sehat dengan cukup baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengerti cara menggunakan Kartu Indonesia Sehat dan juga memahami tentang pelayanan dan informasi di Puskesmas Pasir Nangka, partisipasi masyarakat di wilayah Puskesmas Pasir Nangka juga sudah dikatakan terlaksa secara maksimal.
4. Faktor penghambat dalam program Kartu Indonesia Sehat yaitu Penyalahgunaan dan penyimpangan pada program Kartu Indonesia Sehat menjadi ancaman serius bagi tujuan awal program untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Peningkatan pengawasan, prosedur verifikasi yang ketat, dan transparansi dalam pengelolaan dana adalah beberapa upaya yang dapat membantu mengurangi risiko penyimpangan dalam program ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

Bagi Pemerintah

Pemerintah berupaya untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan memastikan bahwa Kartu Indonesia Sehat dapat diakses dengan mudah oleh seluruh penduduk., upaya edukasi tentang manfaat dan prosedur penggunaan Kartu Indonesia Sehat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah harus berkomitmen dalam menyediakan sosialisasi yang tepat dan efektif agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal. Pemerintah juga harus membuat regulasi yang tepat dalam menentukan verifikasi dan validasi Data terhadap penerima program Kartu Indonesia Sehat. Hal ini antara lain terkait dengan penetapan penerima Kartu Indonesia Sehat untuk mewujudkan penerima yang tepat sasaran.

Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu memahami dengan jelas manfaat dan cakupan layanan yang diberikan oleh kartu Indonesia Sehat. Pengetahuan mengenai layanan kesehatan yang dapat diakses dengan kartu ini akan membantu masyarakat untuk memanfaatkan program ini secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara, Sahya 2012. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Vol. 1. CV Pustaka Setia.
- Tjandra, W. Riawan 2021. Hukum administrasi negara. Sinar Grafika.
- Ervianingsih, Niluh Puspita Dewi. 2020 Kebijakan Pelayanan Kesehatan. Widina Bhakti Persada Bandung

Jurnal :

- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Barat, D. K. K (2019). Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (Kis) Dalam Pelayanan Kesehatan Di Upt Puskesmas Kecamatan Sekolaq.
- CENDEKIA Jaya PJ, Erna E, Sumaryono S. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin. *CENDEKIA Jaya*. 2020;2(2):96-113. doi:10.47685/cendekia-jaya.v2i2
- Dwiyanto, Agus, 2006. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta
- Fitri, E. (2020). Administrasi Tata Usaha.
- Irmawati, Sri. 2017. Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sangurara Kecamatan Tatanga Kota Palu: *Jurnal Katalogis*.
- Klemens L, Apriani F. Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Pelayanan Kesehatan Di Upt Puskesmas Kecamatan Sekolaq Dasar Kabupaten Kutai Barat. *J Adm Negara*. 2019;7(1):8579-8591.
- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17-21.
- Monika I. Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Batang Kuis. Published online 2019.
- Nasional (JKN) Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Donggala Kabupaten Donggala e *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 11, November 2016 hlm 138-146.
- Niha, Munawir Rizal. "Hubungan Karakteristik Individu Dan Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (Jkn-Kis) Dengan Status Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jkn-Kis Di Kecamatan Singkil Kota Manado." *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi* 7.5 (2018).
- Rahman, M. (2017). Ilmu Administrasi (Vol. 1). Sah Media.
- Rizal Wahyudin, Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan
- Rahmadani, I. M. (2020). Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Batang Kuis (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Saraswati NA, Hemran F. Implementasi Program Kis. Implementasi Program Kis. Published online 2021:2013-2015.

Simbolon, Naomi Rahmawati Br, et al. "Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik 1.2* (2019): 147-155.

Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa*. Airlangga University Press.

Widiya Wati, (2019) *Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X Kabupaten Kerinci*, *Jurnal Kesehatan Andalas*, hal 366-376

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Undang-Undang N0.36 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas.